

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan berkaitan erat hubungannya dengan manusia atau makhluk hidup yang berakal sebagai pendidik atau peserta didik. Pendidikan merupakan hak dasar untuk semua individu, bahkan untuk segala situasi dan kondisi dari suatu individu tersebut, karena Pendidikan ialah fondasi untuk pembelajaran seumur hidup (Anjarsari., et al, 2018). Pendidikan merupakan bagian elemen penting dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, terbuka, cerdas, dan mampu bersaing serta meningkatkan kesejahteraan semua warga negara Indonesia (Suwandayani, 2019). Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak. Bantuan yang diberikan kepada anak yang dimaksud disini adalah usaha seseorang untuk mengajarkan atau membina kecerdasan materi, budi pekerti, perilaku sosial, cara berinteraksi dengan orang lain, dan olah emosional pada diri anak sehingga anak dapat berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan sosialnya (Sholawati, 2019). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Hasbullah, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diterangkan juga bahwa setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, tak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus (Lukitasari., et al, 2017). Oleh karena itu anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, anak kesulitan belajar, dan anak inklusi berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak lain. Hak asasi manusia yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi yang paling dasar dari anak-anak, membuat pendidik berusaha untuk lebih giat dan memperluas akses pendidikan kepada semua siswa dalam berbagai latar belakang (Ikramullah dan

Sirojuddin, 2020). Perluasan pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pendidik dalam hal ini guru atau sekolah, namun membutuhkan peran serta dari keluarga, masyarakat, dan negara yang diharapkan mampu menuntaskan kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia (Siswanto dan Susanti, 2019).

Setiap anak pada hakikatnya memiliki ketergantungan secara utuh kepada orang tuanya dari berbagai macam aspek kehidupan, tidak terlepas salah satunya yaitu dari segi pendidikan (Supriyanto, 2019). Hal ini juga tidak terlepas dengan hak-hak yang juga harus di dapat oleh anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Tetapi ada banyak sentimen serta banyak penilaian negatif orang-orang terhadap anak-anak kebutuhan khusus sendiri sehingga terkadang dinilai sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat (Tamoto, 2016). Semua anak tersebut adalah anugerah yang didapat dari Yang Maha Kuasa terlepas keterbatasan yang dimilikinya. Namun akibat adanya penyempingan sikap dari masyarakat terhadap anak-anak disabilitas sehingga menyebabkan mereka tersisihkan terutama dalam haknya untuk menerima pendidikan yang layak di masyarakat (Lisdiana, Supriyanto & Tarsidi, 2018). Hal ini juga memengaruhi kemampuan orang tua di dalam memenuhi haknya untuk memberikan pendidikan kepada anaknya yang menyandang disabilitas tersebut. Ada beberapa diantaranya dari orang tua yang justru memaksakan anaknya untuk bersekolah di sekolah biasa dan sekolah khusus untuk anak-anak spesial lainnya (Rofia, Nurul Hidayati & Ina Rafiana, 2017). Oleh karena itu, dalam hal ini perlu adanya wadah atau sekolah yang khusus memberikan pelayanan secara utuh sesuai kebutuhan bagi anak-anak penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusi (Ashraf & Ishaq, 2020).

Sejauh ini dalam dunia pendidikan, penyandang difabel seringkali terpisahkan dari masyarakat. Dalam sistem pendidikan, hal tersebut biasa dikenal sebagai sistem segregasi. Sistem ini memisahkan siswa disabilitas dengan menempatkan mereka di Sekolah Luar Biasa (SLB). Pemisahan tersebutlah yang menyebabkan para difabel cenderung dianggap sebagai orang asing dalam masyarakat. Akhirnya, terciptalah stigma dan diskriminasi dalam masyarakat saat ada penyandang difabel yang berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak dikhususkan bagi dirinya (Marwati, 2021). Ada anggapan bahwa anak berkebutuhan khusus dianggap berbeda dari anak normal karena dianggap sosok tidak berdaya sehingga perlu dibantu dan dikasihani. Tentu pandangan ini tidak sepenuhnya benar, setiap anak mempunyai kekurangan sekaligus kelebihan. Oleh karena itu, dalam memandang anak berkebutuhan khusus, kita harus melihat dari kemampuan sekaligus ketidakmampuannya. Anak berkebutuhan khusus memerlukan perhatian, baik

dalam kasih sayang, Pendidikan, maupun dalam berinteraksi social sehingga dapat mengembangkan potensinya secara optimal (Wijaya, 2019).

Kemudian menjawab persoalan tersebut pemerintah Indonesia dalam usahanya memenuhi kebutuhan pendidikan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi, menyelenggarakan pendidikan inklusi. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 mewajibkan agar pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan. Dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus (Kemdikbud, 2019). Selain itu juga ditegaskan adanya salah satu kesepakatan Internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh kelompok berkebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (Darma dan Binahayati Rusyidi, n.d).

Pendidikan inklusif itu sendiri adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh negara (Kemdikbud, 2019). Pendidikan inklusif adalah sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas dan masyarakat. Pendidikan inklusif juga dapat di pandang sebagai bentuk kepedulian dalam merespon spektrum kebutuhan belajar peserta didik yang lebih luas, dengan maksud agar baik guru maupun siswa, keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan suatu masalah (Rosliana dan Rina Hizriyani. 2019). Oleh karena itu pendidikan inklusif ini merupakan implementasi dari hak asasi manusia untuk memperoleh Pendidikan, dasar tersebut maka konsekuensi logis hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak menerima Pendidikan tanpa mendiskriminasikan kondisi fisik, intelktual, social, emosional, linguistic, termasuk untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan mendapatkan Pendidikan khusus (Yuliasut, 2019).

Praktek inklusi merupakan tantangan baru bagi pengelola sekolah. dengan adanya pendidikan inklusi menyebabkan tantangan baru pada guru, yaitu dalam hal melakukan perubahan yang signifikan terhadap program pendidikan dan mempersiapkan guru-guru untuk menghadapi semua kebutuhan siswa baik siswa berkebutuhan khusus maupun non berkebutuhan khusus (Putri & Hamdan, 2021). Sekolah sebagai tempat yang mengimplementasikan ideologi pendidikan inklusif harus mengenal dan merespon setiap kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap siswanya. Seperti mengakomodasi berbagai macam gaya belajar, serta menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa. Untuk itu tentunya harus melalui manajemen yang baik, penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, pemanfaatan sumber daya dengan sebaik-baiknya, dan penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitarnya. Dan para penyandang difabel pada umumnya menggunakan fasilitas- fasilitas tertentu untuk menunjang proses pendidikannya dan fasilitas-fasilitas tertentu itu juga sukar untuk ditemukan dan membutuhkan dana yang cukup tinggi untuk mendapatkannya, khususnya bagi anak penyandang difabel tunanetra, seperti alat untuk mencetak huruf Braille, penyediaan komputer bicara, CCTV bagi penyandang tunanetra *low vision* dan sebagainya (Adriadi, 2014). Oleh sebab itu sangat penting juga partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif, peran mereka diakomodasi dalam wadah seperti komite sekolah, dewan pendidikan dan forum-forum pemerhati Pendidikan inklusif. Perannya bisa langsung atau tidak langsung, seperti bantuan tenaga ahli, dukungan pembiayaan, dukungan sarana dan prasarana serta penyaluran kelulusan. Sementara dukungan tidak langsung berupa bantuan pemikiran untuk pengambilan kebijakan, bantuan akses jaringan dan pengawasan (Adhi dan Ni Putu Seniwati, 2017).

Selain itu dalam penyelenggaraannya Pendidikan inklusif dibutuhkan dukungan Manajemen Pendidikan yang baik agar terselenggaranya pendidikan bagi seluruh peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, Manajemen pendidikan inklusi yang dimaksud disini disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada serta kebutuhan pendidikan yang diperlukan oleh anak inklusi (Palupi, 2019). Adapun manajemen pendidikan inklusi itu sendiri merupakan proses yang terkait erat dengan tujuan dan efektifitas serta efesiensi penyelenggaraan system Pendidikan bagi seluruh peserta didik tak terkecuali bagi peserta didik berkebutuhan khusus. manajemen pendidikan inklusi yang terlihat menonjol adalah penekanan terhadap pengelolaan program pendidikan inklusi. yakni Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar manajemen, karena dalam

organizing, actuating, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Agar resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Pengorganisasian (organizing) Fungsi pengorganisasian (organizing = pembagian kerja) berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Pelaksanaan (Actuating) merupakan menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan atasan kepada bawahan atau anggota harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab, totalitas, dan maksimal. Perlu adanya kerjasama yang baik dari atasan kepada bawahan atau anggota maupun antar sesama anggota dalam melaksanakan tugas-tugas. Sehingga tujuan yang akan dicapai dapat diwujudkan. Pengawasan (*controlling*) merupakan bagian dari manajemen yang penting untuk dilakukan, karena dalam pengawasan akan mengetahui sebuah program berjalan dengan lancar atau terselip sebuah kendala. Pengawasan memang berusaha semaksimal mungkin mengawal program-program yang telah direncanakan supaya berjalan maksimal dan sebagaimana mestinya (Wiliyanto, 2022).

Selain itu manajemen sekolah inklusi dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sarana prasarana yang memadai, kurikulum sekolah yang tepat, tanggungjawab pendidik terhadap tugas untuk mendukung keberhasilan siswa, serta peran orangtua dan masyarakat yang tinggi. Apabila hal tersebut tidak terlaksana dengan baik, tidak berfungsi secara optimal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka efektifitas dan efisiensi sekolah inklusi kurang optimal. Landasan filosofi utama dari manajemen sekolah inklusi adalah Pancasila. Lima Pilar dalam Pancasila didasari oleh dasar yang mendasar lagi yaitu Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan anak inklusi maupun anak berkebutuhan khusus lainnya dan anak normal pada umumnya seperti perbedaan suku, ras, agama, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Karena berbagai keberagaman yang ada di Indonesia menjadi misi untuk hidup bermasyarakat yang didalamnya terdapat masyarakat yang saling membutuhkan satu dengan lainnya (Palupi, 2019).

Namun pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia masih belum sinkron dengan tujuan dan panduan penyelenggaraan sekolah inklusi, baik sarana dan prasarana, kualifikasi pengajar, siswa, serta dukungan orang tua dan masyarakat (Jannah., et al, 2021). Sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara sekolah inklusif tetap melaksanakan pendidikan inklusif walaupun secara kualitas pelaksanaan sekolah inklusif belum terlalu baik (Jannah., et al, 2021). Selain itu kondisi di lapangan masih

banyak sekolah-sekolah pada umumnya tidak siap untuk melaksanakan program pendidikan inklusi. Selain ketidak siapan sumber daya manusia dan sarana prasarana, ketidak tahuan tentang tujuan dan manfaat yang diperoleh anak, baik anak normal maupun anak yang memiliki kebutuhan. Pelaksanaan pendidikan di lapangan cenderung menilai bahwa jika anak berkebutuhan khusus diberikan pelayanan pendidikan yang sama dan bersamaan dengan anak normal maka hanya akan mengganggu proses pendidikan dan pengaruh tidak baik pada anak normal. Pola pendidikan seperti ini akan membawa dampak pada anak baik anak berkebutuhan khusus maupun anak normal, yaitu apatis, tidak menghormati, tidak percaya diri, individualisme, dan tidak siap hidup dimasyarakat. Padahal program pendidikan inklusi ini memberikan pendidikan tentang nilai perbedaan dan keberagaman sehingga anak-anak akan saling menghormati dan membantu satu sama lain sebagai bekal menghadapi kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep negara Indonesia, yaitu memiliki berbagai keberagaman budaya, bahasa, sosial, geografi, agama, dsb. Semua itu yang harus kita ajarkan kepada anak usia dini secara konkret melalui program pendidikan inklusi (Bahri, 2022).

Dapat dipahami mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih terjadi banyak problematika, mulai dari kesanggupan dari sekolah, peraturan dan kebijakan, sistem pendidikan, kualifikasi guru, sarana dan prasarana, tradisi atau cultur di sekolah bahkan dukungan dari orang tua dan masyarakat (Jannah., et al, 2021). Meski sampai saat ini sekolah inklusi masih terus melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, namun dilihat dari sisi idealnya sekolah inklusi merupakan sekolah yang ideal baik bagi anak dengan dan tanpa berkebutuhan khusus. Lingkungan yang tercipta sangat mendukung terhadap anak dengan berkebutuhan khusus, mereka dapat belajar dari interaksi spontan teman-teman sebayanya terutama dari aspek sosial dan emosional. Sedangkan bagi anak yang tidak berkebutuhan khusus memberi peluang kepada mereka untuk belajar berempati, bersikap membantu dan memiliki kepedulian. Disamping itu bukti lain yang ada mereka yang tanpa berkebutuhan khusus memiliki prestasi yang baik tanpa merasa terganggu sedikitpun (Darma dan Binahayati Rusyidi, n.d).

Implementasi penyelenggaraan Pendidikan inklusif sudah marak diseluruh Indonesia, salah-satunya di Kota Palembang. Kota Palembang merupakan salah satu daerah di Sumatera Selatan yang menaruh perhatian terhadap layanan Pendidikan bagi anak kebutuhan khusus (abk), terutama Pendidikan inklusif. Salah satu sekolah yang menerapkan Pendidikan inklusif di Kota Palembang yaitu SDN 30 Palembang yang terletak di jalan Sungai Tawar Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang,

berdasarkan observasi awal bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang SDN 30 Palembang telah menyelenggarakan pendidikan Inklusif dan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang sebagai sekolah percontohan pendidikan inklusif sekaligus sebagai ketua Pembina khusus Pendidikan inklusi SD Negeri di Kota Palembang.

Salah satu sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi di sekolah SDN 8 Talang Kelapa menyatakan bahwa implementasi pendidikan inklusi dapat meningkatkan nilai-nilai karakter anak-anak seperti peduli sosial, toleransi dan mandiri (Nurfatah & Arafat, 2017). Pelaksanaan pendidikan inklusi tersendiri sangat penting dilakukan sebagai salah satu upaya dalam memajukan pendidikan (Hendarman, 2016). Namun dalam melihat seberapa baik implementasi pendidikan inklusif tidak hanya dilihat berdasarkan kebermanfaatannya saja, tetapi juga dilihat berdasarkan kebijakan sekolah, proses pembelajaran, pengelolaan kelas, jenis kurikulum dan sumber dayanya (Faiqatul, Yunus, dkk, 2019).

Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri jumlah ABK mencapai 27.831 orang, 1.103 ABK diantaranya berada di Kota Palembang. Dan SD Negeri 30 Palembang sudah menampung sekitar 315 ABK, hampir 70% (220 anak) merupakan siswa pindahan dari Sekolah Luar Biasa. Semua anak berkebutuhan khusus diterima disekolah ini kecuali tunanetra dan gangguan mental dan banyak capaian yang diperoleh SDN 30 Palembang dalam mendidik anak ABK, antara lain yaitu 100% ABK yang lulus dari SDN 30 Palembang melanjutkan ke SMP Negeri, selain itu adanya beberapa prestasi ABK seperti hapal Al-Qur'an 3 jus, menang lomba story telling tingkat nasional dan ABK sudah membaaur dengan anak lainnya dan muncul rasa empati dan saling peduli dari sesama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait manajemen Pendidikan inklusi, Adapun judul penelitian yang akan di ambil yaitu "Manajemen Pendidikan Inklusi di SDN 30 Palembang".

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi focus penelitian ini adalah Manajemen Pendidikan Inklusi di SDN 30 Palembang. Berdasarkan focus penelitian maka sub focus penelitian ini adalah:

1. Perencanaan Pendidikan Inklusi di SDN 30 Palembang mulai dari Perencanaan Kepesertadidikan, Kurikulum, Pembelajaran, Tenaga Pendidik, Saranan dan Prasarana, Pembiayaan dan Hubungan Masyarakat.

2. Pengorganisasian Pendidikan Inklusi di Sdn 30 Palembang mulai dari Perencanaan Kepesertadidikan, Kurikulum, Pembelajaran, Tenaga Pendidik, Saranan dan Prasarana, Pembiayaan dan Hubungan Masyarakat.
3. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SDN 30 Palembang mulai dari Kepesertadidikannya, Kurikulum, Pembelajaran, Tenaga Pendidik, Saranan dan Prasarana, Pembiayaan dan Hubungan Masyarakat.
4. Evaluasi Pendidikan Inklusi di SDN 30 Palembang, mulai dari Kepesertadidikan, Kurikulum, Pembelajaran, Tenaga Pendidik, Saranan dan Prasarana, Pembiayaan dan Hubungan Masyarakat.

C.Pertanyaan Penelitian

Adapun rumusan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pendidikan inklusi di SDN 30 Palembang?
2. Bagaimana pengorganisasian pendidikan inklusi di SDN 30 Palembang?
3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN 30 Palembang?
4. Bagaimana evaluasi pendidikan inklusi di SDN 30 Palembang?

D.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perencanaan pendidikan inklusi di SDN 30 Palembang.
2. Menganalisis pengorganisasian pendidikan inklusi di SDN 30 Palembang.
3. Menganalisis pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN 30 Palembang.
4. Menganalisis bagaimana evaluasi pendidikan inklusi di SDN 30 Palembang.

E.Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan manajemen Pendidikan inklusi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi Lembaga Pendidikan dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hasil penelitian ini dalam rangkah untuk

melakukan manajemen Pendidikan inklusi di Lembaga Pendidikan masing-masing.

F.State Of The Art

Adapun *State of the art* dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang akan di jelaskan pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
State of The Art

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Original penelitian
1	Nanda Rizki Wiliyanto (2021), Judul Penelitian Manajemen Pendidikan Inklusi DI SMAN 1 Padangan.	Membahas manajemen pendidikan inklusi	Penelitian ini hanya berfokus membahas tentang fungsi manajemen	Peneliti menggunakan fungsi manajemen dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Dan membahas ruang lingkup dari manajemen Pendidikan inklusi.
2	Syaiful Bahri (2022), judul penelitian Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar,	Membahas manajemen pendidikan inklusi	Penelitian ini berfokus pada perencanaan dan ruang lingkup manajemen pendidikan inklusi	Peneliti menggunakan fungsi manajemen dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,

				pelaksanaan dan evaluasi.
3	Anita Kresnawaty dan Rina Heliawati (2109), Manajemen Pembelajaran Inklusi Pada Anak Usia Dini.	Membahas salah satu ruang lingkup manajemen pendidikan inklusi yaitu manajemen pembelajaran	Penelitian ini hanya berfokus pada manajemen pembelajaran inklusi	Peneliti menggunakan fungsi manajemen dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dan membahas berbagai ruang lingkup manajemen Pendidikan inklusi.
4	Evi Isna Yunita, Sri Suneki, dan Husni Wakhyudin (2019), judul penelitian yaitu Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Proses Pembelajaran dan Penanganan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus	Membahas manajemen pendidikan inklusi	Penelitian ini berfokus pada Proses Pembelajaran dan Penanganan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus	Peneliti menggunakan fungsi manajemen dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dalam segala kegiatan (program), guna

				agar terselenggaranya pendidikan bagi seluruh peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
5	Inda Yasmita, Mahdum, dan Rr. Sri Kartikowati (2022), Manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk siswa berkebutuhan khusus di sds cendana duri.	Membahas manajemen pendidikan inklusi	Penelitian ini berfokus pada perencanaan, Pengorganisasian, pengarahan dan evaluasi	Peneliti menggunakan fungsi manajemen dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
6	Ikramullah dan Akhmad Sirojuddin (2020), berjudul Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar	Membahas penerapan Pendidikan inklusi.	Penelitian ini hanya berfokus pada pengoptimalan penerapan manajemen inklusi dan hambatan dalam penerapan.	Peneliti membahas pada fungsi manajemen Pendidikan inklusi dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dan membahas berbagai ruang

				lingkup manajemen Pendidikan inklusi.
7	Dyah Witasoka (2016), judul penelitian yaitu Manajemen Pendidikan Inklusif Sma Muhammadiyah Di Kota Yogyakarta	Membahas manajemen pendidikan inklusi	Penelitian ini berfokus pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan	Peneliti menggunakan fungsi manajemen dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas terkait manajemen pendidikan inklusi, dapat diperoleh kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, adapun perbedaannya yaitu pada penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi terhadap pendidikan inklusi. Selain itu memiliki perbedaan dalam pembahasan ruang lingkup manajemen pendidikan inklusi. Sehingga penelitian yang dilakukan peneliti terdapat kebaruan dan penyempurnaan dalam penelitian yang akan dilakukan.

*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*